

SKRIPSI

**PENGUATAN ORGANISASI SAYAP PARTAI PADA INSAN MUDA
DEMOKRAT INDONESIA (IMDI)**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memenuhi Gelar Sarjana pada
Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Hasanuddin



OLEH:

RIA MAGFIRAH NASIR

E041191011

**DEPARTEMEN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

2023

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI
PENGUATAN ORGANISASI SAYAP PARTAI PADA INSAN MUDA
DEMOKRAT INDONESIA (IMDI)

Yang diajukan Oleh :

RIA MAGFIRAH NASIR

E041191011

Dipertahankan dihadapan Tim Penguji Skripsi

Pada tanggal : 24 Januari 2023

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Drs. Andi Yakub, M.Si., Ph.D.

Dr. Gustiana A. Kambo, S.IP., M.Si.

NIP. 19621231 199003 1 023

NIP. 19730813 199802 2 001

Mengetahui,

Ketua Departemen Ilmu Politik



Drs. Andi Yakub, M.Si., Ph.D.

NIP. 19621231 199003 1 023

HALAMAN PENERIMAAN

SKRIPSI
PENGUATAN ORGANISASI SAYAP PARTAI PADA INSAN MUDA
DEMOKRAT INDONESIA (IMDI)

Disusun dan Diajukan Oleh :

RIA MAGFIRAH NASIR

E041191011

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh Panitia Ujian Skripsi
pada Departemen Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Menyetujui,

PANITIA UJIAN

Ketua : Drs. H. Andi Yakub, M.Si., Ph.D (.....)

Sekretaris : Dr. Gustiana A. Kambo, S.IP., M.Si. (.....)

Anggota : Andi Naharuddin, S.IP., M.Si (.....)

Anggota : Ummi Suci Fathia Bailusy, S.IP., M.IP. (.....)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ria Magfirah Nasir
NIM : E041191011
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)
Program Studi : Ilmu Politik

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Penguatan Organisasi Sayap Partai pada Insan Muda Demokrat Indonesia (IMDI)”** adalah benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi skripsi ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, Januari 2023



(RIA MAGFIRAH NASIR)

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas berkah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Penguatan Organisasi Sayap Partai pada Insan Muda Demokrat Indonesia (IMDI)”**. Tak lupa shalawat serta salam semoga selalu tercurah limpah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman. Skripsi ini merupakan salah satu syarat wajib bagi mahasiswa strata satu (S-1) pada Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, untuk menyelesaikan studi dan mendapatkan gelar Sarjana Ilmu Politik (S.IP.).

Skripsi ini penulis persembahkan pertama-tama kepada dua orang yang sangat berjasa didalam hidup penulis yaitu kedua orang tua penulis, **Bapak Drs. Muhammad Nasir dan Ibu Dr. Mariati Rahman, M.Si.**, yang telah menjadi orang tua terhebat yang selalu sabar dalam mendidik dan memberikan motivasi, nasehat, perhatian, dan kasih sayang serta doa yang tentu takkan bisa penulis balas. Juga kepada kakak-kakak penulis **Anugrahandini Nasir, S.Hut., M.Si.**, dan **Muhammad Ilham Nasir, S.Hut.**, serta **Suci Nur Aulia Zakinah, S.Hut.** Terima kasih atas semua dukungan, motivasi, perhatian serta doanya.

Terima kasih tak terhingga kepada Dosen Pembimbing **Bapak Drs. H. Andi Yakub, M.Si., Ph.D** dan **Ibu Dr. Gustiana A. Kambo, S.IP., M.Si.** yang telah banyak membantu, memberikan arahan, meluangkan waktu, tenaga dan pikiran, dalam membimbing penulis dalam penyusunan Skripsi ini.

Terselesainya skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak, oleh sebab itu perkenankan dengan penuh rasa hormat penulis ingin mempersembahkan skripsi ini dan menghaturkan beribu terima kasih kepada :

1. Rektor Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., yang telah memberi penulis kesempatan belajar di Universitas Hasanuddin beserta seluruh jajaran rektorat. Terima kasih tak terlupakan juga pada Rektor Universitas Hasanuddin 2018-2022, Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A. yang memberikan perubahan-perubahan yang positif bagi sistem pendidikan di Universitas Hasanuddin.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Bapak Dr. Phil. Sukri, S.IP., M.Si., sekaligus Dosen Ilmu Politik yang telah banyak membantu dan memberi ruang pada penulis selama menempuh perkuliahan di lingkup Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Hasanuddin.

3. Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Ibu Dr. Hasniati, S.Sos., M.Si., beserta segenap jajaran staf akademik, ada Pak Sutamin, Ibu Irma, dan Pak Herman.
4. Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Alumni, Bapak Dr. M. Iqbal Sultan, M.Si., beserta segenap jajaran staf.
5. Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi, Bapak Prof. Dr. Suparman Abdullah, M.Si. beserta segenap jajaran staf.
6. Ketua Departemen Ilmu Politik, Bapak Drs. Andi Yakub, M.Si., Ph.D., yang telah membantu kelancaran administrasi akademik.
7. Seluruh dosen-dosen Departemen Ilmu Politik: Bapak Prof. Dr. Muhammad, S.IP., M.Si., Alm. Bapak Prof. Dr. Basir Syam, M.Ag., Bapak Dr. Muhammad Saad, M.A., Ibu Dr. Gustiana A. Kambo, S.IP., M.Si., Ibu Dr. Ariana, S.IP., M.Si., Ibu Dr. Sakinah Nadir, S.IP., M.Si., Bapak Andi Naharuddin, S.IP., M.Si., Ibu Endang Sari, S.IP., M.Si., Bapak Dr. Muh. Imran, S.IP., M.Si., Ibu Ummi Suci Fathia Bailusy, S.IP., M.IP., Bapak Zulhajar, S.IP., M.A., dan Ibu Dian Ekawaty, S.IP., M.A., yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada penulis selama perkuliahan.

8. Staf Administrasi Departemen Ilmu Politik, Bapak Syamsuddin, S.T., dan Ibu Musriati S.E., yang telah membantu dan memberikan banyak kemudahan terhadap penulis dalam urusan-urusan administrasi akademik di Departemen Ilmu Politik.
9. Kepada seluruh narasumber / informan khususnya **DPC IMDI** dan **DPD Partai Demokrat Kota Makassar** atas kesediaannya menyisihkan waktu bagi penulis untuk melakukan wawancara terkait data-data yang penulis butuhkan dalam proses penyelesaian skripsi ini. Dan kanda **Iqbal Lubis** yang berkenan memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengetahui lebih banyak dalam penelitian penulis terhadap IMDI.
10. Seluruh teman-teman **Ilmu Politik angkatan 2019 dan Diplomasi 2019**. Teman-teman dari awal perkuliahan hingga saat ini yang insyaallah akan tetap menjadi teman yang baik. Terima kasih atas cerita yang diukir selama ini semoga kita semua bisa mencapai kesuksesan masing-masing.
11. Seluruh keluarga besar **Himapol Fisip Unhas** untuk kanda-kanda angkatan 2014, 2015, 2016, 2017 dan 2018, serta adik-adik angkatan 2020 dan 2021, yang telah menjadi tempat berproses dan berorganisasi selama ini.
12. Sahabat *Onfills* (**Hilmi Dwi, Maqfirah R, Naurah Zawawi, Siti Fauziah, Fatimah Azzahrah, Uswatun Khasanah, Hafifah Rezky,**

Mutia Salwa, Anastasya Adawiah, dan Ade Septianingsih) yang telah mengisi 10 tahun pertemanan penulis sedari SMP hingga saat ini. Terima kasih telah menemani penulis, maaf adik bontotmu harus lulus duluan. Semangat mengejar cita-cita, semoga kalian semua bisa sukses dan mendapat gelar yang kalian inginkan masing-masing.

13. Sahabat Smansa (**Tiara Rahmadhani, Nur Ramadanti, Vanda Tri Andini, Risna Apriliyanti, Alfian Zulkadri**, dan semua teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu). Masa dan cerita di sekolah menengah akhir akan selalu menjadi kisah yang penulis kenang dan ingat dengan baik seakan-akan semuanya baru terjadi kemarin, *and also thank you to somebody I met in 2016 who now I barely talked to anymore.*

14. Sahabat *Bikini Bottom* (**Andi Aisyah, Andi Khusnul, Tarisa Rahmadani, Srinovia Nurul, Nabilah Palungan**). Terima kasih telah mengisi dan berperan penting dalam masa perkuliahan penulis mulai dari paguyuban pamitnya pengumpulan sampai pamitnya skripsi-an. *Always count me in thru this phase ya, i know we're gonna make it till the end.*

15. Teruntuk seseorang yang telah menemani penulis selama tiga tahun terakhir, terima kasih banyak atas atensi dan dukunganmu selama ini. *Whatever you want to do right now, the bill comes due and you*

should be aware of that because you decide how do you want your life now and later. Semoga bahagia senantiasa bersamamu.

16. Terakhir, diri penulis sendiri. *Take it easy, you made a milestone here. Don't be too hard on yourself next time.*

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan oleh karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki dan sebagai manusia biasa yang senantiasa memiliki kelalaian dan keterbatasan. Namun penulis tetap yakin bahwa setiap kekurangan dan kelebihan dalam skripsi ini akan ada banyak makna yang dapat dipetik untuk kualitas hidup yang lebih baik. Oleh karena itu, segala masukan, saran, maupun kritik yang sifatnya membangun senantiasa terbuka bagi semua pihak untuk peningkatan kualitas penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Makassar, Januari 2023

Ria Magfirah Nasir

ABSTRAK

Ria Magfirah Nasir E041191011. Penguatan Organisasi Sayap Partai pada Insan Muda Demokrat Indonesia. Di bawah bimbingan Drs. H. Andi Yakub, M.Si., Ph.D sebagai pembimbing utama dan Dr. Gustiana A. Kambo, S.IP., M.Si. sebagai pembimbing pendamping

Keberadaan Organisasi Sayap bagi partai politik sebagai penguatan adalah suatu hak yang legal sejak terbitnya UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik. Keberadaannya diharapkan bukan sekedar pemenuhan hak undang-undang dan pelengkap struktural semata, melainkan kebutuhan nyata sebagai pendukung peran dan fungsi partai politik. Partai Demokrat turut membentuk organisasi sayap partai dalam rangka penguatan mesin politiknya terutama terhadap perluasan basis massa. Namun Organisasi Sayap Partai Demokrat kurang berkontribusi dalam pemenuhan kebutuhan partai terhadap kader politik terlebih jika melihat sedikitnya kader sayap partai yang duduk di jabatan politik.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran dan Fungsi Sayap Partai Demokrat Kota Makassar dalam menjalankan kontribusi dan upaya perluasan basis massa serta mengetahui efektifitas keberadaan Organisasi Sayap Partai Demokrat terhadap perluasan basis massa partai Demokrat Makassar. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan Sayap Partai Demokrat mempunyai peran dan fungsi sebagai penguatan komunikasi politik, penguatan rekrutmen politik, dan penguatan pendidikan politik. Akan tetapi pelaksanaan peran dan fungsi tersebut masih bersifat parsial, tidak intensif dan sistematis. Sehingga keberadaan Organisasi Sayap Partai Demokrat belum efektif terhadap kontribusi dan upayanya di Partai Demokrat Makassar. Diharapkan Partai Demokrat Kota Makassar hendaknya serius mempersiapkan organisasi sayap sebagai sarana kaderisasi politik kader partai dengan mempersiapkan kurikulum kaderisasi politik yang jelas dan sistematis, sehingga tercapainya efektivitas kaderisasi politik Sayap Partai Demokrat Kota Makassar yang optimal.

Kata kunci: Organisasi Sayap Partai, Perluasan Basis Massa, Penguatan

ABSTRACT

Ria Magfirah Nasir E041191011. Strengthening of Party Wing on Insan Muda Demokrat Indonesia. Under the guidance of Drs. H. Andi Yakub, M.Si., Ph.D as the main supervisor and Dr. Gustiana A. Kambo, S.IP., M.Si. as a co-advisor

The existence of Wing Organizations for political parties as reinforcement has been a legal right since the issuance of Law Number 2 of 2008 concerning political parties. It is hoped that its existence will not merely fulfill statutory rights and structural complements, but rather a real need to support the role and function of political parties. The Demokrat Party has helped form the party's wing organization in order to strengthen its political machine, especially in expanding the mass base. However, the Demokrat Party Wing Organization does not contribute enough to meeting the party's need for political cadres, especially if you see that there are only a few party wing cadres who sit in political positions.

This study aims to determine the Role and Function of the Demokrat Party Wing in Makassar City in carrying out contributions and efforts to expand the mass base and determine the effectiveness of the existence of the Demokrat Party Wing Organization in expanding the Demokrat party's mass base. The research method used is descriptive qualitative. Data collection techniques by observing, interviewing and documentation.

The results of this study indicate that the existence of the Demokrat Party Wing has a role and function as strengthening political communication, strengthening political recruitment, and strengthening political education. However, the implementation of these roles and functions is still partial, not intensive and systematic. So that the existence of the Demokrat Party Wing Organization has not been effective in its contributions and efforts in the Makassar Demokrat Party. It is hoped that the Demokrat Party should seriously prepare a wing organization as a means of political regeneration of party cadres by preparing a clear and systematic political regeneration curriculum, so as to achieve optimal political regeneration effectiveness of the Demokrat's Wing.

Keywords: Party Wing Organization, Mass base expansion, Strengthening

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENERIMAAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	11
1.4.1 Manfaat Teoritis	11
1.4.2 Manfaat Praktis	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Institusionalisasi Partai Politik	13
2.2 Pemikiran Tentang Keberadaan Partai Politik	15
2.2.1 Keberadaan Partai Politik	15
2.2.2 Fungsi Partai Politik	17
2.2.3 Hubungan Partai Politik dengan Kelompok Kepentingan	19
2.3 <i>Civil Society</i> , Kelompok Kepentingan, dan Organisasi Kemasyarakatan	22
2.4 Pemikiran Tentang Organisasi Sayap	27
2.4.1 Pengertian Organisasi Sayap	27
2.4.2 Fungsi Organisasi Sayap	28
2.5 Kerangka Pikir	36
2.6 Skema Pemikiran	39
2.7 Penelitian Terdahulu	39
BAB III METODE PENELITIAN	47
	xiii

3.1 Pendekatan dan Tipe Penelitian	47
3.2 Objek Penelitian	48
3.3 Jenis Data dan Sumber Data	48
3.4 Teknik Pengumpulan Data	49
3.5 Teknik Analisis Data	54
BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	57
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	57
4.2 Sejarah dan Ideologi Insan Muda Demokrat Indonesia	58
4.3 Fungsi, Tujuan, Tugas Pokok dan Kegiatan Perkumpulan Insan Muda Demokrat Indonesia	62
4.3.1 Fungsi IMDI	62
4.3.2 Tujuan IMDI	63
4.3.3 Tugas Pokok IMDI	64
4.4 Keanggotaan dan Kader IMDI	64
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	65
5.1 Kontribusi IMDI sebagai Organisasi Sayap Partai Demokrat	65
5.1.1 Kontribusi IMDI Secara Nasional	65
5.1.2 Kontribusi IMDI Secara Regional	68
5.1.3 Kontribusi IMDI Secara Umum dalam Perluasan Basis Massa	71
5.2 Upaya IMDI dalam Perluasan Basis Massa	81
5.2.1 Penguatan melalui Komunikasi Politik	81
5.2.2 Penguatan melalui Rekrutmen Politik	85
5.2.3 Penguatan melalui Pendidikan Politik	89
BAB VI PENUTUP	95
6.1 Kesimpulan	95
6.2 Saran	96
DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN I	102
LAMPIRAN II	111

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang Masalah

Partai politik hadir dalam kehidupan negara yang menganut prinsip demokrasi adalah hal yang hampir mustahil untuk ditiadakan. Bahkan menurut S.C. Stokes, '*Political parties created democracy*', partai politiklah yang membentuk demokrasi, bukan sebaliknya.¹ Oleh sebab itu, partai politik merupakan pilar yang perlu bahkan sangat penting untuk diperkuat derajat pelembagaannya (*the degree of institutionalization*) dalam setiap sistem politik yang demokratis. Derajat pelembagaan partai politik itu sangat menentukan kualitas demokrasi kehidupan politik suatu negara.² Sejalan dengan hal tersebut, R.H. Soltau mendefinisikan partai politik sebagai sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisir, yang bertindak sebagai suatu kekuatan politik dan yang dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih, bertujuan menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka.³

¹ S. C. Stokes, "Political Parties And Democracy", Annual Review Political Science 18, No 2 (1999), 243.

² Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia, (Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer 2007), 710.

³ Miriam Budiardjo, Pengantar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia, (2000), 162

Partai politik bagi kebanyakan ahli penting keberadaannya karena partai politik berusaha untuk mengagregasi dan mewakili berbagai kepentingan yang ada di dalam masyarakat. Selain itu partai politik juga berfungsi untuk melakukan rekrutmen politik dan membuat agenda kebijakan. Secara normatif Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.⁴

Organisasi kemasyarakatan mempunyai definisi yang agak berbeda dengan partai politik dimana organisasi kemasyarakatan secara normatif diartikan sebagai organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan peraturan perundang-undangan.⁵

Partai politik secara logika mempunyai banyak jumlah, maka semakin luas pula rakyat menyalurkan aspirasinya dan meraih peluang

⁴ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

⁵ Undang-Undang 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Perpu 2 tahun 2017 tentang Perubahan atas UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang.

dalam memperjuangkan hak-haknya serta melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara. Banyaknya alternatif pilihan dan meluasnya ruang gerak partisipasi rakyat memberikan indikasi yang kuat bahwa sistem pemerintahan di tangan rakyat sangat mungkin untuk diwujudkan. Sehingga perlu adanya upaya untuk memperkuat kondisi internal maupun eksternal partai. Penguatan secara internal dapat dilakukan melalui konsolidasi internal partai, penguatan proses pengkaderan dan penguatan struktur partai. Pada eksternal partai dapat dilakukan dengan melakukan ekspansi terhadap penguatan mesin politik partai seperti organisasi sayap atau juga sering disebut dengan *underbow* partai politik. Organisasi sayap ini yang nantinya dapat dijadikan jembatan suatu partai politik untuk menjangkau seluruh golongan masyarakat baik itu pemuda, buruh, perempuan maupun petani yang notabene merupakan sumber massa.

Dilihat dari definisi organisasi sayap partai maka organisasi tersebut berkaitan erat dengan keberadaan partai politik. Dan memang begitu kenyataannya. Organisasi sayap partai salah satu tujuannya adalah untuk menarik orang sesuai dengan segmentasinya misalnya wanita atau pemuda agar pada akhirnya tertarik dengan program-program di partai politik. Namun demikian organisasi sayap partai politik bukanlah partai politik. Organisasi sayap partai juga tidak secara eksplisit disebut dalam undang-undang organisasi kemasyarakatan.

Secara konstitusional organisasi kemasyarakatan, partai politik, dan organisasi sayap partai politik merupakan perwujudan dari kemerdekaan berserikat berkumpul mengeluarkan pikiran baik lisan maupun tulisan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28 UUD 1945. Secara legalitas keberadaan partai politik dan organisasi kemasyarakatan diatur oleh peraturan perundang-undangan dalam hal ini UU Partai Politik dan UU Organisasi kemasyarakatan.

Partai politik juga diberikan haknya untuk membentuk dan memiliki organisasi sayap seharusnya dimanfaatkan dan dioptimalkan sebaik-baiknya oleh seluruh pengurus Parpol. Melalui pengaturan organisasi sayap dalam undang-undang partai politik tersebut merupakan bentuk penegasan atas jaminan kepastian, kedudukan, dan hubungannya dengan Parpol induk sebagai pembentuknya. Sesuai dengan sifatnya yaitu sebagai organisasi massa sayap dari partai politik, maka pembentukan dan keberadaannya harus mengikuti dan disesuaikan legalitasnya dengan undang-undang organisasi massa (Ormas).⁶

Partai politik telah dilegalkan untuk membentuk dan memiliki organisasi sayap, namun jika dilihat di dalam anggaran dasar partai politik masih belum semua partai politik mengatur di dalamnya. Berdasarkan hasil

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang

telaah terhadap anggaran dasar partai yang secara tegas mengatur tentang organisasi sayap antara lain adalah partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)⁷, Partai Demokrat⁸, dan partai Golongan Karya (Golkar)⁹ sedang parpol yang lain berdasarkan hasil telaah masih belum mencantumkan pengaturan organisasi sayap dalam anggaran dasar partainya. Berikut dikutip ketentuan anggaran dasar partai politik untuk menunjukkan bagaimana hubungan antara partai dengan organisasi sayap. Anggaran Dasar Partai Gerindra Pasal 23 ayat (1) Organisasi Sayap sebagai sumber anggota yang dibentuk oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai GERINDRA berperan sebagai pendukung Partai untuk membantu perjuangan Partai GERINDRA melalui pelaksanaan Program Partai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kemudian Anggaran dasar partai Demokrat Pasal Pasal 97 ayat (1) Organisasi Sayap merupakan wadah kaderisasi dan perjuangan sebagai pelaksana kebijakan partai untuk memenuhi kebutuhan strategis dalam rangka memperkuat basis dukungan partai. Kemudian anggaran dasar partai Golongan Karya Pasal 25 ayat (1) Partai GOLKAR memiliki Organisasi Sayap yang merupakan wadah perjuangan sebagai pelaksana kebijakan partai yang dibentuk untuk

⁷ Organisasi sayap partai diatur dalam Anggaran Dasar Partai BAB IV tentang ORGANISASI SAYAP Pasal 23.

⁸ Organisasi sayap partai diatur dalam Anggaran Dasar Partai BAB XIII tentang ORGANISASI SAYAP Pasal 94

⁹ Organisasi sayap partai diatur dalam Anggaran Dasar Partai BAB X tentang ORGANISASI SAYAP Pasal 25.

memenuhi kebutuhan strategis, dalam rangka memperkuat basis dukungan partai. Menelaah ketentuan dalam anggaran dasar dari tiga partai tersebut dapat digambarkan bagaimana pola hubungan antara partai dengan organisasi sayap.

Semua partai politik yang mempunyai organisasi sayap sebagaimana diamanatkan dalam anggaran dasar partai yang pada intinya semua partai mengakui bahwa organisasi sayap sangat penting sebagai wadah kaderisasi, wadah perjuangan, pelaksana kebijakan partai, dan pendukung partai.

Berkaitan dengan penguatan partai politik dengan organisasi sayapnya tersebut, pada masa pasca-kemerdekaan beberapa partai politik sudah memiliki basis massa yang dimobilisasi lewat pembentukan organisasi pendukung yang meliputi semua sektor, mulai dari sektor umum, profesi atau lapangan pekerjaan. Seperti, Partai Komunis Indonesia (PKI), yang memiliki sejumlah organisasi seperti: Pemuda Rakyat, Gerwani, CGMI, IPPi, Sobsi, BTI, Lekra, PGRI Non-Vaksentral dan lain-lain. Kemudian Partai Nasional Indonesia (PNI) dengan organisasi pendukung seperti Pemuda Marhaen, Wanita Marhaen, GMNI, GSNI, Petani, dan Leknas. Serta Partai Nahdlatul Ulama (NU) yang memiliki organisasi seperti Pemuda Ansor, Muslimat NU, Fatayat, PMII, IPNU/IPPNU, Pertanu, Lesbumi dan lain-lain. Terakhir, tentu saja kita tidak dapat membicarakan

Masyumi tanpa organisasi pendukungnya, seperti: GPII, HMI, PII, Gasbiindo dan lain-lain.

Keberadaan suatu partai politik hampir tidak bisa dipisahkan dengan keberadaan organisasi-organisasi sayap partai. Partai politik dianggap sebagai *parent (mother) organization* dari organisasi sayap partai politik. Pertanyaan dasarnya adalah mengapa keberadaan partai politik dibarengi dengan keberadaan organisasi sayap partai? Apa rasionalisasi dari eksistensi organisasi sayap partai? Beberapa literatur menjelaskan secara berbeda mengenai hal ini. Misalnya saja pendirian organisasi sayap partai dapat dimanfaatkan untuk membantu memasyarakatkan dan melaksanakan program-program partai politik. Organisasi sayap partai juga penting dalam rangka memobilisasi massa guna memenangkan partai dimana organisasi sayap tersebut berafiliasi.¹⁰ Selain itu organisasi sayap partai berperan sebagai pendukung-pendukung partai politik untuk membantu perjuangan partai melalui pelaksanaan program partai dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

¹⁰ Republika.co.id 19 Februari 2013. Contoh organisasi sayap partai politik diantaranya adalah: Gerakan Nelayan Tani Indonesia (Ganti), Banteng Muda Indonesia (BMI), Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi), Taruna Merah Putih (TMP), dan Relawan perjuangan Demokrasi (Repdem) yang berafiliasi dengan PDIP. tujuh organisasi sayap partai Golkar yang meliputi Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG), Kelompok Perempuan Partai Golkar (KPPG), Satuan Kerja (Satker) Ulama, Majelis Dakwah Indonesia (MDI), Himpunan Wanita Karya (HWK), Al-Hidayah dan Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI). Organisasi sayap Partai PPP diantaranya Angkatan Muda Ka'bah (AMK), Gerakan Pemuda Ka'bah (GPK), Generasi Muda Pembangunan Indonesia (GMPI) dan Persaudaraan Muslim Seluruh Indonesia (Parmusi). Organisasi sayap Partai Nasdem diantaranya Badan Advokasi Hukum (BAHU) NasDem, Gerakan Massa Buruh (Gemuruh), Liga Mahasiswa NasDem, Persatuan Petani Nasional Demokrat (Petani NasDem) Garda Pemuda NasDem.

Salah satu organisasi sayap yang bergerak di bidang kepemudaan adalah Insan Muda Demokrat Indonesia yang selanjutnya disingkat dengan IMDI. IMDI merupakan organisasi bentukan dari Partai Demokrat yang memiliki tugas sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai bab XIII pasal 94 yang menunjukkan spesifikasi organisasi sayap dari Partai Demokrat yang menyatakan bahwa organisasi sayap adalah wadah kaderisasi dan perjuangan sebagai pelaksana kebijakan partai untuk memenuhi kebutuhan partai, memenuhi kebutuhan strategis dalam rangka memperkuat basis dukungan partai, serta mempersiapkan kader organisasi dalam pengisian jabatan-jabatan publik melalui mekanisme demokrasi, dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan melalui Partai Demokrat.

IMDI awal terbentuknya adalah sebuah komunitas/relawan pemenangan pasangan capres/cawapres Pak SBY-JK pada pilpres tahun 2004. Komunitas IMDI terbentuk tahun 2003 yang dimotori oleh Teuku Rifky Harsya, yang sekarang menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat mendampingi AHY sebagai ketua umum.

Pengurus Insan Muda Demokrat Indonesia (IMDI) memandang perlunya peran politik anak muda sebagai representasi semangat reformasi dan tentunya meneruskan estafet kepemimpinan Nasional. Tujuan lahirnya IMDI sangat sejalan dengan Partai Demokrat yang memilih Nasionalis Religius sebagai pedoman politiknya. Pemuda diharapkan bisa menjadi

motor penggerak perubahan dan mampu mengayomi kebutuhan rakyat Indonesia. Dengan alasan ini juga lah IMDI hadir ditengah masyarakat Indonesia. IMDI juga memiliki delapan karakter yang harus dimiliki oleh para pengurus IMDI, diantaranya seperti kebersamaan, kepedulian sosial, milenial, produktif dan inovatif, *team work*, optimis, proaktif, dan keragaman.

Selain penjelasan diatas, IMDI juga memberi banyak kontribusi ke partai Demokrat yang bisa dilihat dari awal terbentuknya IMDI yaitu sebagai komunitas anak muda untuk memenangkan pasangan capres SBY-JK. Selain itu, kontribusinya adalah menempatkan kader-kader terbaik IMDI di jajaran pengurus Pusat Partai Demokrat. Juga ikut memberikan kontribusi kursi di legislatif khususnya di DPR RI.

Pendiri IMDI, yaitu Teuku Rifky Harsya, Michel Watimena dan Muslim sekarang menjadi anggota DPR RI. Bahkan Teuku Rifky Harsya saat ini menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat.

Selain itu, IMDI diproyeksikan dapat membantu kinerja partai seperti dalam memberikan pendidikan ataupun pengetahuan politik terhadap masyarakat sehingga masyarakat dapat lebih kritis dalam menanggapi berbagai isu politik. IMDI juga dapat berperan sebagai sarana pendekatan ataupun pengenalan kepada masyarakat terhadap suatu partai.

Di sisi lain, pemberdayaan organisasi sayap ini, idealnya menjadi sebuah keharusan karena melalui pemberdayaan tersebut kader dilatih

bagaimana membangun sistem politik yang baik. Dengan adanya kader yang militan, yang sudah terlatih dan mampu bersaing secara kapasitas intelektual dan memiliki gagasan yang jelas sesuai dengan *platform* Parpol. Organisasi Sayap ini tidak hanya berperan penting dalam kemenangan pemilu tapi lebih kepada sebagai sarana untuk membangun etika politik masyarakat akar rumput.

Keberadaan IMDI sebagai organisasi sayap Partai Demokrat merupakan fenomena menarik yang perlu dikaji terutama dalam hal kiprahnya di kancah perpolitikan nasional dengan komposisi kader yang sebagian besarnya adalah kaum muda yang memiliki pengaruh terhadap pengembangan dan keberlangsungan konsep kepartaian.

Oleh karena itu, secara lebih spesifiknya penulis melakukan penelitian ini dengan mengambil judul: “Penguatan Organisasi Sayap Partai Pada Insan Muda Demokrat Indonesia (IMDI)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Apa kontribusi IMDI (Insan Muda Demokrat Indonesia) sebagai Organisasi Sayap Partai Demokrat di Kota Makassar?
2. Bagaimana upaya IMDI (Insan Muda Demokrat Indonesia) dalam perluasan basis massa Partai Demokrat di Kota Makassar?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Batasan Penelitian dan rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk menggambarkan, menjelaskan serta mengetahui kontribusi IMDI (Insan Muda Demokrat Indonesia) sebagai Organisasi Sayap Partai Demokrat di Kota Makassar.
2. Untuk menggambarkan, menjelaskan serta mengetahui upaya IMDI (Insan Muda Demokrat Indonesia) dalam perluasan basis massa Partai Demokrat di Kota Makassar.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan informasi, memperkaya khazanah keilmuan dan kajian ilmu sosial politik, khususnya hal-hal yang berkaitan dengan kepartaian dan relasinya dengan organisasi sayap.

1.4.2 Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini yaitu:

- a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan, serta sebagai sarana aktualisasi diri untuk mentransformasikan ilmu pengetahuan dan teori yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan dengan membandingkan fakta di lapangan.

b. Bagi Dewan Pengurus Cabang (DPC) IMDI dan Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Demokrat Kota Makassar

1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan, pertimbangan dan perbandingan kepada DPC IMDI Kota Makassar untuk dapat menjalankan peranannya dengan lebih baik, khususnya dalam upaya perluasan basis massa.

2) Hasil Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan kepada DPD Partai Demokrat Sulawesi Selatan akan pentingnya peran organisasi sayap (IMDI).

c. Bagi Civitas Akademika

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai masukan, pertimbangan dan perbandingan bagi kalangan akademisi, wacana keilmuan mengenai kondisi sosial politik dan permasalahan yang ada di dalamnya serta bahan acuan pada penelitian sejenis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini menjelaskan mengenai bagaimana konsep dan pendekatan yang digunakan oleh penulis yang berkaitan dengan penguatan lembaga organisasi sayap yang melihat dari sisi kelompok kepentingan, organisasi massa, atau *civil society*, selanjutnya konsep dan pendekatan dirangkum menjadi dasar kerangka berpikir dalam penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu yang relevan dan sejalan dengan permasalahan penelitian yang membantu menumbuhkan serta memperkaya referensi penelitian sekaligus menjadi pembanding dalam penelitian ini.

2.1 Institusionalisasi Partai Politik

Institusionalisasi partai politik adalah sebuah proses pengorganisasian dan prosedur untuk mendapatkan *value* (nilai) dan *stability* (stabilitas) tertentu. Ketika partai politik telah berhasil memformulasi dan menginternalisasi nilai-nilai organisasionalnya serta dalam periode waktu tertentu terdapat stabilitas internal, maka partai politik tersebut dapat dikatakan telah terlembagakan dengan baik.¹¹ Ketidakmampuan partai politik untuk mengimplementasikan segala peran dan fungsinya dalam realitas politik menjadi hal yang memperpanjang catatan buruk bagi partai

¹¹ Primadi, Agam., Purwaningsih, Titin. 2019. "Institusionalisasi Partai Politik dalam Pilkada 2017 (Studi Kasus: Partai Golkar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)", *Journal of Government and Civil Society*, Vol. 3, No. 1, Hal. 63-78.

politik itu sendiri. Institusionalisasi partai tidak dapat dilaksanakan dengan baik karena terdapat kelemahan-kelemahan internal dan eksternal partai. Kemampuan eksternal dari partai politik yang belum berjalan fungsional secara baik, ditambah konflik internal organisasi yang semakin mengemuka sehingga menenggelamkan peran partai politik secara institusi.

Institusionalisasi partai politik menurut Guillermo O'Donnell melibatkan dua aspek penting, yaitu *value infusion* (nilai pemasukan) dan *behavioral routinization* (rutinitas perilaku). Pertama, *value infusion* merupakan suatu proses dimana para anggota menggeser fokus dari tujuan-tujuan dan kepentingan individu yang spesifik ke arah tujuan-tujuan besar organisasi partai politik. Dari sini maka partai politik akan dapat mengembangkan legitimasi, penerimaan di masyarakat, dan tentunya mengakarnya partai politik (*party rootedness*). Kedua, *behavioral routinization*, hal ini terjadi kalau ada pola-pola organisasi yang stabil, dimana aturan-aturan dan norma-norma secara formal dan informal tertanam di dalam pola-pola aktivitas partai sehingga akan ada prediktabilitas dan reguritas perilaku dan ekspektasi-ekspektasi dari para anggota, pengurus partai politik, maupun masyarakat luas lainnya.¹²

¹² Andi, R. H. 2013. "Studi tentang Rekomendasi Dukungan DPW PAN Sulawesi Selatan pada Syahrul Yasin Limpo Agus Arifin Nu'mang Tahun 2013", Skripsi Institusionalisasi Partai Politik.

2.2 Pemikiran Tentang Keberadaan Partai Politik

2.2.1 Keberadaan Partai Politik

Partai politik mempunyai peranan yang sangat penting di dalam demokrasi. Sejarah perkembangan partai politik di Indonesia sangat berpengaruh pada perkembangan demokrasinya. Hal ini dapat dipahami bahwa partai politik merupakan gambaran wajah peran rakyat dalam cerminan tingkat partisipasi politik masyarakat. Partai politik lahir dari berbagai aspirasi rakyat yang berkeinginan untuk bersatu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang mana kehidupan partai politik ini dimulai sejak kemerdekaan, ditandai dengan munculnya banyak partai (*multi party*). Sebagai sarana rekrutmen politik, partai politik berfungsi mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai (*political recruitment*). Dengan demikian, partai politik turut memperluas partisipasi politik masyarakat dan menarik golongan muda untuk dididik menjadi kader yang akan datang.

Selain itu, partai menyuarakan pandangan serta kepentingan berbagai kalangan masyarakat. Partai politik dapat berarti organisasi yang mempunyai basis ideologi yang jelas, dimana setiap anggotanya mempunyai pandangan yang sama dan bertujuan untuk merebut kekuasaan atau mempengaruhi kebijaksanaan negara baik secara langsung maupun tidak langsung serta ikut pada sebuah mekanisme

pemilihan umum untuk bersaing secara kompetitif guna mendapatkan posisi dalam pemerintahan.

Carl Friedrich juga memberi batasan bahwa partai politik dapat diartikan sebagai kelompok manusia yang terorganisasikan secara stabil dengan tujuan untuk merebut atau mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan bagi pemimpin partainya dan berdasarkan kekuasaan itu akan memberikan kegunaan materiil dan idiil kepada para anggotanya.¹³

Sedangkan menurut UU Nomor 2 Tahun 2008, Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dari beberapa pengertian tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa partai politik merupakan organisasi politik yang memberikan jalan bagi anggota atau kadernya untuk berkompetisi memperoleh suara rakyat guna mengisi jabatan-jabatan politik.

¹³ Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, Jakarta, Grasindo, (2017), 116

2.2.2 Fungsi Partai Politik

Dalam suatu negara demokrasi, partai politik memiliki lima fungsi penting dalam proses penyelenggaraan kehidupan negara demokrasi. Kelima fungsi partai politik itu, meliputi:¹⁴

a. Sarana komunikasi politik, Dalam menjalankan fungsi sebagai sarana komunikasi politik, partai politik mempunyai peran penting sebagai penghubung antara yang memerintah dan yang diperintah. Menurut Sigmund Neumann dalam hubungannya dengan komunikasi politik, partai politik merupakan perantara besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga pemerintah yang resmi dan mengaitkannya dengan aksi politik di dalam masyarakat politik yang lebih luas.

b. Sarana sosialisasi politik (*political socialization*), dalam melaksanakan fungsi ini partai politik tidak menyampaikan begitu saja segala informasi dari pemerintah kepada masyarakat atau dari masyarakat kepada pemerintah, tetapi merumuskan sedemikian rupa sehingga penerima informasi dapat dengan mudah memahami dan memanfaatkan. Segala kebijakan pemerintah yang biasanya dirumuskan dalam bahasa teknis dapat diterjemahkan dalam bahasa yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Sebaliknya segala aspirasi, keluhan, dan tuntutan masyarakat

¹⁴ Miriam Budiardjo, Ibid hlm. 163-164

yang biasanya tidak terumuskan dalam bahasa teknis dapat diterjemahkan oleh partai politik ke dalam bahasa yang dapat dipahami oleh pemerintah. Jadi proses komunikasi politik antara pemerintah dan masyarakat dapat berlangsung secara efektif melalui partai politik.

c. Fungsi sosialisasi politik partai adalah upaya menciptakan citra (*image*) bahwa partai politik memperjuangkan kepentingan umum dan lebih tinggi nilainya apabila mampu mendidik anggotanya menjadi manusia yang sadar akan tanggung jawabnya sebagai warga Negara dan menempatkan kepentingan sendiri di bawah kepentingan nasional. Melalui proses sosialisasi politik inilah para anggota masyarakat memperoleh sikap dan orientasi terhadap kehidupan politik yang berlangsung dalam masyarakat. Proses ini berlangsung seumur hidup yang diperoleh secara sengaja melalui pendidikan formal, nonformal, dan informal maupun secara tidak sengaja melalui kontak dan pengalaman sehari-hari, baik dalam kehidupan keluarga maupun dalam kehidupan masyarakat. Melalui proses ini masyarakat mengenal dan mempelajari nilai-nilai, norma-norma, dan simbol-simbol politik negaranya dari berbagai sarana sosialisasi politik, seperti sekolah, partai politik, dan pemerintah. Partai politik dalam sistem politik dapat menyelenggarakan proses sosialisasi politik pada masyarakat.

d. Sarana rekrutmen politik, Fungsi partai politik ini yakni seleksi kepemimpinan dan kader-kader yang berkualitas. Rekrutmen politik

menjamin kontinuitas dan kelestarian partai sekaligus merupakan salah satu cara untuk menjaring dan melatih calon-calon kader.

e. Sarana pengatur konflik (*conflict management*), Potensi konflik selalu ada di setiap masyarakat. Negara Indonesia yang bersifat heterogen yang terdiri dari etnis, agama, dan lain-lain. Perbedaan tersebut dapat menyebabkan konflik. Maka partai politik melaksanakan fungsi sebagai pengatur konflik. Partai politik sebagai salah satu lembaga demokrasi berfungsi untuk mengendalikan konflik melalui cara berdialog dengan pihak-pihak yang berkonflik, menampung, dan memadukan berbagai aspirasi dan kepentingan dari pihak-pihak yang berkonflik dan membawa permasalahan pada musyawarah badan perwakilan rakyat untuk mendapatkan penyelesaian berupa keputusan politik. Untuk mencapai penyelesaian berupa keputusan itu diperlukan kesediaan berkompromi diantara para wakil rakyat, yang berasal dari partai-partai politik.

2.2.3 Hubungan Partai Politik dengan Kelompok Kepentingan

Hasil dari setiap kebijakan merupakan bagian dari proses politik yang mencerminkan beragamnya aspirasi yang muncul yang merupakan konsekuensi dari beragamnya kepentingan masyarakat. Meskipun demikian, dalam sistem politik, tidak semua aspirasi yang muncul dapat disalurkan melalui kekuatan-kekuatan politik formal seperti partai politik

yang memiliki fungsi resmi sebagai penyalur aspirasi, tetapi juga kekuatan lain yakni kelompok kepentingan (*interest group*).

Dalam tahap tertentu, keterbatasan partai politik, baik karena sumberdaya material, sumber daya manusia, orientasi ideologi, kultural, faksionalisme, kepentingan jangka pendek, minat terhadap isu, keterbatasan jaringan, masalah komunikasi, hubungan personil, dan lain-lain menyebabkan mereka terkadang tidak cukup dapat diharapkan untuk menyampaikan aspirasi dalam masyarakat secara efektif. Keadaan ini menyebabkan orang lebih menumpukan perhatiannya dalam menyampaikan aspirasi melalui unsur kelompok kepentingan. Dengan demikian, kelompok kepentingan merupakan salah satu kekuatan penting dalam konfigurasi politik yang dalam tahap tertentu dapat mendinamiskan sistem politik, dalam bentuk lahirnya politik kelompok-kelompok yang menegaskan adanya pluralisme dan kompetisi dalam masyarakat.

Dengan demikian dapat diketahui, bahwa partai politik memiliki beberapa fungsi yaitu sebagai sarana pendidikan politik, artikulasi politik, komunikasi politik, sosialisasi politik, agregasi politik, dan rekrutmen. sehingga partai politik mempengaruhi sistem politik untuk pencapaian Negara yang demokratis dan warga Negara masyarakat Indonesia akan memiliki kesadaran dalam kehidupan berpolitik. Pelaksanaan fungsi di atas, pertama-tama dan utama kepada dan melalui organisasi sayap partai

politik. Agar terencana, terarah dan terpadu. Sebelum melakukan fungsi-fungsi partai politik kepada masyarakat yang lebih luas.

Partai politik bagi kebanyakan ahli penting keberadaannya karena partai politik berusaha untuk mengagregasi dan mewakili berbagai kepentingan yang ada di dalam masyarakat. Selain itu partai politik juga berfungsi untuk melakukan rekrutmen politik dan membuat agenda kebijakan. Secara normatif Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.¹⁵

Membuat lembaga-lembaga politik menjadi efektif bukan hanya meliputi penguatan dari segi kapasitas dan sumber dayanya tetapi juga merancangnyanya agar cocok dengan situasi (adaptif). Hal ini merupakan sebuah persoalan yang sangat kompleks dan kontroversial berkaitan dengan aturan-aturan elektoral dan konstitusional yang membentuk perwakilan dan pemerintahan. Begitu juga dengan Partai Demokrat banyak melakukan terobosan untuk menghadapi mesin-mesin politik partai-partai besar adalah membuat ikatan dengan masyarakat secara langsung, mereka memperkuat basis konstituen dan jaringan sosial di berbagai

¹⁵ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

pelosok tanah air, gerakan ke akar rumput ini diprediksi para analis politik bakal lebih membumi, sehingga lebih efektif dalam mendulang suara. Kemampuan Demokrat dalam menggerakkan mesin politiknya tentunya tidak lain berkat pemasifan organisasi sayap partai politik yang berupaya merekrut massa di setiap ranahnya, seperti pada pemuda, petani, buruh maupun perempuan.¹⁶

2.3 *Civil Society*, Kelompok Kepentingan, dan Organisasi

Kemasyarakatan

Diskusi mengenai *civil society* terbagi dua pandangan. Ada sebagian yang berpandangan bahwa *civil society* memiliki keterikatan yang erat dengan Negara, termasuk dalam hal ini dengan partai politik.¹⁷ Negara, termasuk apparatus dan kebijakannya, merupakan bagian dari konsep sebuah masyarakat politik yang dicita citakan.

Sebaliknya, *civil society* merupakan sebuah ranah masyarakat yang terpisah dengan ranah Negara karena dalam peran dan fungsinya yang lebih bebas dan merdeka dari intervensi Negara.¹⁸ *Civil society* adalah

¹⁶ Putu Suasta dan Valentino Barus, Partai Demokrat: Laboratorium Pendidikan Politik, Lestari Kiranatama (2015), 10

¹⁷ Pada masa Yunani Kuno, Civil society dan negara adalah berasal dari definisi yang sama yakni koinonia politike (masyarakat politik) dimana setiap manusia dikenal sebagai zoon politicon (makhluk politik). Lihat Neera Chandhoke. Benturan Negara dan Masyarakat Sipil. Yogyakarta, ISTAWA, 2001, hlm.115

¹⁸ Pandangan ini diwakili oleh Hegel dimana civil society adalah momentum dimana peran transisi dari keluarga menjadi organisasi sosial dan nantinya berujung pada terbentuknya negara. Ibid, hlm.176

kelompok masyarakat yang memiliki kemandirian yang tegas terhadap berbagai kepentingan akan kekuasaan. Yang tidak kalah penting dalam konsep *civil society* adalah adanya partisipasi aktif dari semua warga negara baik yang tergabung dalam berbagai perkumpulan, organisasi atau kelompok lainnya sehingga akan membentuk karakter demokratis di lembaga tersebut.

Literatur yang ada pada saat ini lebih banyak membahas mengenai *civil society*, partai politik,¹⁹ dan organisasi kemasyarakatan.²⁰ Masih relatif jarang literatur yang menjelaskan mengenai organisasi sayap partai politik.²¹ Hal ini diperkirakan karena fitur organisasi sayap partai politik tidak sejelas partai politik dan organisasi kemasyarakatan. Selain itu karakteristik organisasi sayap partai juga dalam derajat tertentu *overlapped* antara *civil society*, kelompok kepentingan dan organisasi kemasyarakatan.

Definisi di atas agak berbeda dengan organisasi kemasyarakatan dimana organisasi kemasyarakatan secara normatif diartikan sebagai organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela

¹⁹ Giovanni Sartori, *Parties and Party Systems: a Framework for Analysis*, Cambridge University Press 1976. Richard S. Katz, *A Theory of Parties and Electoral Systems*, John Hopkins University Press 1980.

²⁰ Tirta Nugraha Mursitama, *Pengkajian Hukum tentang Peran dan Tanggung Jawab Organisasi Kemasyarakatan dalam Pemberdayaan Masyarakat*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional BPHN 2011, Ari Ganjar Herdiansah, *Peran Organisasi Masyarakat (Ormas) dan lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Dalam Menopang Pembangunan di Indonesia*, *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi* Vol 1 No.1 2016.

²¹ Ahmad Asroni, Muhammad Yusup dan Adib Sofia, *Dakwah dan Politik: Menakar Kontribusi Organisasi*

berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan peraturan perundang-undangan.²² Beberapa perbedaan diantara keduanya adalah ruang lingkup dan tujuan. Ormas tidak dibatasi ruang lingkungannya artinya ormas bisa saja bersifat lokal dan setempat dan tidak harus bersifat nasional. Selain itu tujuan ormas tidak bersifat politik namun lebih pada partisipasi dalam pembangunan.

Bertitik tolak dari penjelasan tersebut, penelitian ini akan membicarakan tentang kewujudan organisasi sayap, serta pengaruh dan kedudukannya dalam sistem politik. Sejauh ini diskusi-diskusi tentang proses politik lebih banyak ditumpukan pada partai politik. Padahal dalam kenyataannya seiring dengan membiarkannya kehidupan masyarakat dan munculnya sektor-sektor baru dalam kehidupan menyebabkan keberadaan kelompok kepentingan perlu diperhitungkan secara politik.

Partai politik sesungguhnya secara sengaja bertujuan untuk mendudukan wakil-wakilnya dalam pemerintahan, atau meraih jabatan-jabatan dalam pemerintahan. Dalam prakteknya ada berbagai macam tipe kelompok kepentingan yang beroperasi dalam masyarakat, yang mana mereka berusaha mempengaruhi kebijakan pemerintah.²³ Sebagai pemain

²² Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2007, Op.Cit.

²³ Mohtar Mas'oeed & Colin MacAndrews, Perbandingan Sistem Politik dalam "Kelompok Kepentingan dan Partai Politik", Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2000.

non-pemerintah, mereka dapat berupa: Kelompok profesional, persatuan buruh, pedagang, pengusaha, organisasi keagamaan, persatuan pedagang, organisasi-organisasi persatuan mahasiswa, lembaga-lembaga pemikiran, asosiasi cendekiawan atau pakar, asosiasi perusahaan, universitas, organisasi berbasis etnik, daerah, keturunan (wangsa), dan lain lain.

Kekuatan mereka berasal dari status keanggotaan serta sumber daya manusia maupun dana dan jaringan yang dimiliki. Kelompok-kelompok kepentingan seringkali menjadi penentu agenda, penggalang isu, penyebar gagasan, perumus kebijakan, serta pendesak kepada pemerintah. Meskipun mereka bertujuan mewakili kepentingan-kepentingan anggotanya, dalam artian kepentingan publik yang terbatas, tetapi ada kalanya di antara anggota-anggota kelompok kepentingan juga memiliki ambisi-ambisi yang bersifat pribadi. Bahkan ada di antaranya yang secara pribadi berhasil masuk dalam pemerintahan dan bukan atas nama kelompok kepentingannya.

Sering ditunjukkan bahwa “kepentingan” dan “kelompok kepentingan” dibagi dan dibagi lagi dan kehilangan kepentingan objektif atau real mereka karena alasan-alasan politik.

Bahkan bila artikulasi kepentingan dan kelompok kepentingan mengatur, peneliti akan segera menemukan bahwa “alam semesta kepentingan” tumpang tindih dengan “alam semesta politik” bahwa hal

tersebut sebenarnya tercakup dalam “alam semesta politik” dimana tradisi, nilai, kebiasaan, gaya, dan pola-pola kepemimpinan serta organisasi pemerintahan harus diteliti dengan seksama sebelum kita memahami sistem itu secara keseluruhan.²⁴

Kelompok kepentingan pada hakikatnya dapat dibagi menjadi dua, yakni: Pertama, kelompok kepentingan privat; dan kedua, kelompok kepentingan publik. Kelompok kepentingan privat adalah kelompok kepentingan yang berusaha memperjuangkan kepentingan-kepentingan anggota-anggota yang diwakilinya (golongan tertentu) dalam konteks kehidupan umum seperti: Pengacara, dokter, akuntan, dosen, guru, hakim, pengacara, serta golongan professional lain, termasuk juga para pekerja atau buruh. Juga dalam konteks ini adalah kepentingan produsen atas bidang-bidang usaha tertentu. Sementara kelompok kepentingan yang bersifat publik adalah kelompok kepentingan yang lebih berorientasi mempengaruhi pemerintah agar melakukan tindakan tertentu yang menguntungkan kepentingan umum secara menyeluruh, ketimbang anggotanya. Contoh dari jenis kelompok kepentingan ini adalah gerakan-gerakan sosial yang mengadvokasi isu-isu lingkungan, pendidikan,

²⁴ Roy C. Macridis dan Bernard E. Brown, *Perbandingan Politik* edisi keenam, Penerbit Erlangga (1992), hlm. 317-318

pertambangan, perempuan, ketenagakerjaan, korupsi, kekerasan, perdagangan manusia, konsumen dan sebagainya.²⁵

Namun demikian organisasi sayap partai politik bukanlah partai politik. Organisasi sayap partai juga tidak secara eksplisit disebut dalam undang-undang organisasi kemasyarakatan. Secara konstitusional kelompok kepentingan, organisasi kemasyarakatan, partai politik, dan organisasi sayap partai politik merupakan perwujudan dari kemerdekaan berserikat berkumpul mengeluarkan pikiran baik lisan maupun tulisan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28 UUD 1945. Secara legalitas keberadaan partai politik dan organisasi kemasyarakatan diatur oleh peraturan perundang-undangan dalam hal ini UU Partai Politik dan UU Organisasi kemasyarakatan.

2.4 Pemikiran Tentang Organisasi Sayap

2.4.1 Pengertian Organisasi Sayap

Organisasi sayap merupakan sebuah organisasi bagian dari partai politik yang membantu kinerja dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Dalam Undang-Undang No.2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Pasal 12 huruf (j) menyatakan bahwa salah satu hak partai politik adalah membentuk dan memiliki organisasi sayap partai politik. Organisasi sayap sendiri menurut UU No. 2 Tahun 2008 adalah organisasi yang dibentuk oleh

²⁵ Almond, Gabriel and Powell, Bingham, Comparative Politics: A Developmental Approach, Boston, MA.: Little, Brown and Co., 1980. hlm

dan/atau menyatakan diri sebagai sayap Partai Politik sesuai dengan AD dan ART masing-masing Partai Politik.

2.4.2 Fungsi Organisasi Sayap

Secara filosofis, jika merujuk pada perundangan kepartaian, hal menyangkut fungsi dan peran organisasi sayap partai sejatinya tidak memiliki rujukan cukup jelas, kecuali aspek legalitas pendiriannya sendiri. Hanya, jika dikaji lebih mendalam, penjelasan fungsi dan peran organisasi sayap partai sesungguhnya masih dapat ditelusuri berdasarkan pengertiannya, yang secara konseptual merujuk pada organisasi yang dibentuk oleh dan, atau menyatakan diri sebagai sayap partai politik sesuai dengan AD dan RT masing-masing partai politik.²⁶ Dengan demikian, penjelasan tentang peran dan fungsi OSP sangat bergantung pada setiap *platform* masing-masing parpol, baik pada aspek ideologi, maupun AD dan ART parpol secara umum.

Ditinjau dari perspektif yang lebih umum, peran dan fungsi OSP dalam sistem politik tidak dapat dilepaskan dari fakta semakin berkembangnya dinamika politik Indonesia di segala sektor. Pada ranah teoritis, organisasi sayap lahir atas dasar tujuan modernisasi partai politik dalam upaya mewujudkan satu tata kelola kepartaian yang mengedepankan semangat demokratis. Tujuan ini didasarkan pada

²⁶ Nabilah, Ibid hlm. 28.

kenyataan, bahwa sebagai organisasi modern tertinggi, partai politik harus dapat menjadi cerminan negara demokratis,²⁷ di mana prinsip-prinsip dasar tentang keterbukaan, keadilan, pertanggungjawaban, dan akuntabilitas, kesemuanya harus dijalankan dalam keseluruhan proses kepemimpinan dan distribusi kekuasaan yang transparan. Jika merujuk pada prinsip-prinsip tersebut, maka salah satu fungsi penting organisasi partai adalah bagaimana ikut berperan aktif membangun organisasi kepartaian yang betul-betul mencerminkan semangat demokratis.

Sedangkan pada level praktis, organisasi sayap partai menjadi jawaban atas semakin kompleksnya perubahan sosial masyarakat.²⁸ Bahwa kian beragamnya dinamika politik kontemporer, khususnya pasca dibukanya kran demokrasi, secara langsung menuntut partai politik meningkatkan eksistensi dan tanggung jawab diri sebagai sarana partisipasi politik masyarakat. Dalam kaitan ini, partai politik selain mengemban fungsi rekrutmen kepemimpinan, dirinya juga mengemban tanggung jawab besar lain yang tak kalah penting, seperti halnya fungsi sosialisasi politik dan komunikasi politik.²⁹ Dengan begitu, pada tataran praktisnya kemunculan organisasi sayap partai dapat menurunkan beban

²⁷ Isharyanto, Demokrasi Partai Politik, Suara Merdeka, diakses pada tanggal 24 September 2022.

²⁸ T.n, Paradigma Baru UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/508-paradigma-baru-uu-no-2-tahun-2008-tentang-partai-politik.html> , diakses pada tanggal 24 September 2022.

²⁹ UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU.No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Pasal 10).

tanggung jawab kepartaian, sehingga proses demokratisasi sistem politik nasional dapat berjalan maksimal, baik secara substansial maupun prosedural.

Salah satu usaha yang dapat dilakukan untuk mencegah penurunan keanggotaan partai dan sekaligus untuk menaikkan ketertarikan warga negara ikut bergabung menjadi anggota partai adalah dengan cara memaksimalkan peran dan fungsi organisasi sayap parpol. Hal ini sesuai dengan tujuan utama pembentukan OSP itu sendiri yaitu antara lain dimaksudkan sebagai sumber kader dan pelaksana kebijakan Parpol serta penguat basis Parpol di tengah masyarakat yang saat ini cenderung kehilangan kepercayaan terhadap Parpol. Harapan bahwa dengan OSP, minat masyarakat untuk bergabung dengan parpol akan semakin tinggi karena OSP memiliki citra yang lebih baik di mata publik dibandingkan parpol induk organisasinya antara lain karena OSP belum tercemari oleh praktek-praktek politik kotor sebagaimana telah menimpa sementara kalangan elit Parpol di DPR seperti kasus suap, pelecehan seksual serta sering membolos pada rapat-rapat DPR. Hal ini berimplikasi pada rendahnya kepercayaan masyarakat kepada Parpol.

Sayangnya, kinerja organisasi sayap (*underbow*) partai politik sejauh ini relatif tumpul dan sekadar menjadi pajangan tanpa peta kerja yang jelas. *Underbow* partai hanya dijadikan alat untuk memberi wadah jabatan bagi segelintir elit partai sehingga kinerjanya hampir tidak ada yang menyentuh

rakyat dan hanya menjalankan program-program pragmatis untuk mendapatkan jabatan dan kekayaan.³⁰ Selain itu, menurut M. Djadjiono posisi penting dan sentral OSP sebagai sarana untuk seluas-luasnya menarik minat orang menjadi simpatisan dan/atau anggota parpol masih mengalami banyak kendala, salah satunya adalah adanya ketidakjelasan pola dan tata hubungan antara OSP dengan partai politik induknya. Ketidakjelasan pola dan tata hubungan dimaksud meliputi: (1) Kedudukan dan fungsi OSP bagi Parpol pemiliknya; (2) Hak-hak dan kewajiban Parpol terhadap Pengurus, kader dan anggota OSP; (3) Kejelasan tentang hak-hak dan kewajiban OSP terhadap Parpol induknya; (4) Kejelasan tentang hak-hak OSP dalam proses pengambilan kebijakan dan keputusan dalam Parpol; dan (5) Kejelasan tentang hak-hak dan kewajiban Pengurus, kader dan anggota OSP dalam proses rekrutmen kepengurusan Parpol induknya maupun dalam proses rekrutmen jabatan-jabatan publik yang menjadi kewenangan Parpol induknya.³¹ Oleh sebab itu, beberapa ketidakjelasan relasi antara OSP dan Parpol induknya tersebut perlu diatur secara lebih jelas dalam masing-masing AD/ART Parpol, atau bahkan bila dirasa penting dan perlu, pengaturannya melalui UU Partai Politik.

³⁰ *Underbow* partai masih tumpul, terdapat dalam <https://nasional.sindonews.com/read/583640/12/platform-partai-masih-tumpul-1330391180> , diakses tanggal 25 September 2022

³¹ M. Djadjiono, *Formulasi Hubungan Parpol dengan Organisasi Sayap Partai*, Analisis CSIS Vol. XXXVII, No. 2 Tahun 2008, hlm. 220

Di luar dari itu semua, di setiap negara yang menganut sistem demokratis seperti Indonesia, organisasi sayap mengambil tempat dalam pengertiannya sebagai wujud nyata partisipasi politik dan kehadiran rakyat, bahwa apa yang disebut dengan kedaulatan harus benar-benar berada di tangan rakyat dan dijalankan atas kepentingan rakyat. Setiap tata kelola kekuasaan harus melalui keputusan bersama, terkhusus jika bersentuhan dengan hal-hal yang sifatnya prinsip, seperti halnya menyangkut sirkulasi kepemimpinan. Jika mendasarkan pada kerangka pikir ini, maka kehadiran organisasi sayap pada dasarnya merupakan penerjemahan keberadaan partai politik untuk dapat menguatkan posisi rakyat, terutama dalam hal penentuan pemegang tampuk kekuasaan. Organisasi sayap partai menjadi satu solusi di tengah minimnya keterlibatan masyarakat, atau sulitnya mereka mengakses keberadaan partai politik, yang secara konstitusional merupakan wadah utama rakyat menyampaikan aspirasi dan suara mereka.

Jika logika peran dan fungsi organisasi sayap partai dibangun berdasarkan pemikiran diatas, maka dapat dikatakan bahwa peran dan fungsi lain OSP adalah berkedudukan sebagai organisasi yang diharapkan dapat membantu menjalankan beban tanggung jawab parpol. Merujuk pada pada perundangan partai politik, tepatnya Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, sekurang-kurangnya terdapat lima (5) fungsi kepartaian yang

berhubungan dengan keberadaan organisasi sayap,³² yakni; Pertama, fungsi pendidikan politik, artinya OSP dapat menjadi penyambung peran parpol dalam hal mendidik elemen masyarakat supaya memiliki kesadaran akan hak dan kewajiban mereka dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.³³ Pendidikan politik bernilai penting karena dengannya masyarakat dapat memiliki pengetahuan cukup luas tentang arti penting politik bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan politik yang tinggi akan menjadikan kultur partisipasi politik menjadi emansipatif, sehingga setiap keputusan politik yang dilakukan senantiasa dibangun di atas sikap independensi melalui pertimbangan akal logis dan rasional.

Kedua, sarana komunikasi politik, kenyataan atas semakin berkembangnya dinamika politik dan kian majemuknya realitas kehidupan masyarakat, mutlak mendorong parpol melakukan pembaruan dan modernisasi di segala sektor. Fakta adanya kemajemukan dan pluralitas masyarakat, pada batasan-batasan tertentu, Kedua, sarana komunikasi politik, kenyataan atas semakin berkembangnya dinamika politik dan kian majemuknya realitas kehidupan masyarakat, mutlak mendorong parpol melakukan pembaruan dan modernisasi di segala sektor. Fakta adanya kemajemukan dan pluralitas masyarakat, pada batasan-batasan tertentu, akan menjadi tantangan bagi parpol menjalankan fungsi komunikasi politik

³² Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 Partai Politik Pasal 11 ayat (2).

³³ Itiniyo, *Peran Partai Politik dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari UU. No. 2 Tahun 2011, Volume 4 Nomor 3*, hlm. 30.

secara menyeluruh dan efektif. Dalam batasan ini, keberadaan organisasi sayap dengan segala kelebihanannya merupakan salah satu wujud terobosan baru parpol untuk dapat memudahkan dirinya memasuki ruang publik, menyerap aspirasi dari lintas kalangan, lintas identitas, dan lintas daerah. Kehadiran organisasi sayap mutlak dapat memainkan peran dan fungsi strategis dalam upaya memaksimalkan peran parpol melakukan fungsinya, yakni komunikasi politik.

Ketiga, miniatur sosialisasi politik, secara konseptual sosialisasi mengandung arti proses belajar seorang anggota masyarakat untuk mengenal dan menghayati kebudayaan masyarakat dalam lingkungannya; upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal, dipahami, dihayati oleh masyarakat.³⁴ Jika dilandaskan pada pembacaan ini, sosialisasi politik berarti memperkenalkan atau memasyarakatkan politik ke ranah publik. Dalam hal kehidupan berbangsa dan bernegara, sosialisasi politik menjadi bagian fundamental, karena dengannya masyarakat akan dapat mengetahui secara mendalam perihal fungsi keberadaan parpol, serta arti kehadiran masyarakat dalam setiap keputusan politik.³⁵ Berkaitan dengan ini, maka organisasi sayap dapat diklaim sebagai organisasi khusus partai yang pada tataran praktik dan teorinya memuat peran dan fungsi

³⁴ KBBI Online, <https://kbbi.web.id/sosialisasi> , diakses pada tanggal 24 September 2022

³⁵ Muhammad Hanafi, Kedudukan Musyawarah dan Demokrasi di Indonesia, Jurnal Cita Hukum. Volume I Nomor 2 Desember 2013, hlm. 229.

strategis mengoptimalkan tanggung jawab parpol, termasuk di dalamnya dalam hal sosialisasi politik.

Keempat, medium partisipasi politik. Menurut Miriam Budiardjo (198), partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pemimpin negara dan secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*).³⁶ Pada tahap ini, kontekstualisasi organisasi politik dalam kedudukannya sebagai medium partisipasi politik tidak dapat dimaknai dalam arti populernya. Makna partisipasi politik organisasi sayap partai lebih cenderung mengarah pada keterlibatan aktif masyarakat di akar bawah terhadap setiap dinamika politik kebijakan, politik hukum, dan politik ekonomi yang berkembang di lingkungannya.

Pada level praktisnya, keterlibatan di sini dapat direpresentasikan melalui kegiatan kontrol langsung, demonstrasi, membangun wacana di ruang publik, dan berbagai aktivitas lain yang mengandung semangat kritis, pengawalan, dan *check and balance*.

Kelima, miniatur rekrutmen politik. Dalam pengertian umum, rekrutmen politik dipahami sebagai proses pengisian jabatan politik pada struktur dan lembaga pemerintahan tertentu.³⁷ Dalam sistem demokrasi,

³⁶ Miriam Budiardjo, Partisipasi dan Partai Politik, PT Gramedia, Jakarta (1981) 14-17.

³⁷ Michael Rush dan Phillip Althoff, Pengantar Sosiologi Politik, Rajawali Pers, Jakarta, 2003, hlm. 181.

mutlak dikatakan satu-satunya lembaga yang memiliki legalitas melakukan proses rekrutmen politik adalah partai politik. Hanya, seiring semakin mencairnya dinamika politik dalam tubuh parpol, muncul gejala politik tertentu yang mengindikasikan adanya krisis di sektor rekrutmen politik. Hal ini nampak jelas dari banyaknya elit politisi level struktural yang berhadapan dengan masalah hukum. Kegagalan elit politik menjalankan tanggung jawabnya sebagai perwakilan rakyat, baik di level eksekutif maupun legislatif, mutlak disebabkan oleh rendahnya kualitas proses rekrutmen politik yang sejauh ini lebih dominan dipengaruhi oleh selera popularitas daripada kapasitas kemampuan dan kepemimpinan.³⁸ Berdasarkan kenyataan ini, kehadiran organisasi sayap partai dalam tubuh parpol diharapkan mampu mendongkrak kinerja parpol, sehingga membuat proses rekrutmen politik menjadi lebih baik dan sehat.

2.5 Kerangka Pikir

Kemunculan organisasi sayap partai hakikatnya merupakan bagian dari perwujudan nilai filosofis negara, bahwa negara memberi jaminan kemerdekaan setiap warga negara untuk berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dan berpendapat. Secara yuridis, organisasi sayap partai menemukan ruang legitimasinya melalui UU.No 2 Tahun 2008

³⁸ Asrinaldi Asril, Masalah Rekrutmen Elite Politik Kita, <https://nasional.sindonews.com/read/1201114/18/masalah-rekrutmen-elite-politik-kita1493421212> , diakses pada tanggal 24 September 2022

tentang Partai Politik, tepatnya pasal 12 huruf (j). Sedangkan pada aspek sosiologis, kemunculan organisasi sayap dipicu oleh semakin berkembangnya kehidupan masyarakat sehingga menuntut adanya penguatan peran dan fungsi partai politik.

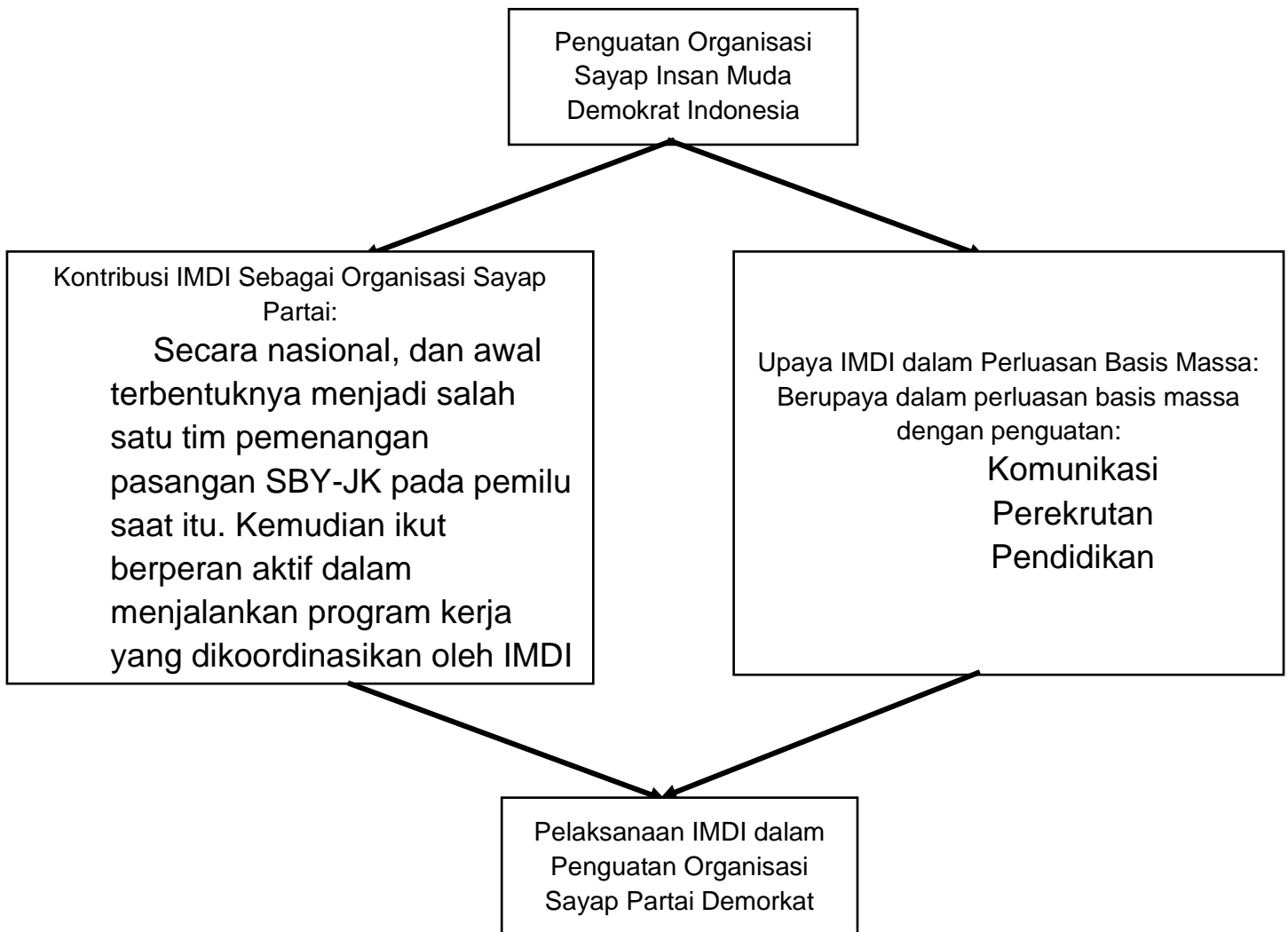
Pada tataran teoritis, kedudukan organisasi sayap sebagai organisasi yang bernaung di bawah perundangan kepartaian mengisyaratkan bahwa organisasi sayap memiliki peran dan fungsi menguatkan eksistensi kepartaian. Baik itu menyangkut sosialisasi, komunikasi, rekrutmen, pendidikan terutama dalam hal partisipasi. Adapun di lingkup praktisnya, organisasi sayap identik dengan organisasi sosial yang lebih banyak bergerak dan berbaur dengan kehidupan masyarakat di lintas aspek. Baik itu di aspek ekonomi, pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, bahkan pada ranah paling sakral sekalipun, seperti halnya agama. organisasi sayap memiliki ciri diri yang fleksibel, karena sifatnya yang fleksibilitas inilah, organisasi sayap menjadi satu gerakan sosial politik yang dapat memperkuat basis elektoral parpol di lintas kalangan.

Dalam konteks politik kontemporer, peran dan fungsi OSP mempunyai pengaruh cukup signifikan. Hal tersebut disebabkan oleh tipologi dan ruang gerak sosial mereka yang berada dekat dengan kehidupan masyarakat, bahkan bersentuhan langsung dengan aktivitas keseharian mereka. Besarnya pengaruh OSP ada pada pola gerakan sosial

politik mereka yang tidak saja bersifat fleksibel, namun juga memiliki sensitivitas diri yang adaptif dengan perkembangan sosial.

Seperti yang diuraikan dalam kajian teori, sebagai Partai Politik, Partai Demokrat berhak membentuk organisasi sayap yang diberi nama dengan IMDI (Insan Muda Demokrat Indonesia). Sebagai organisasi sayap, tentunya IMDI memiliki kontribusi, fungsi dan peran penting terutama dalam hal perluasan basis massa sebagai strategi kaderisasi Partai Demokrat.

2.6 Skema Pemikiran



2.7 Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang "Penguatan Organisasi Sayap IMDI (Insan Muda Demokrat Indonesia)". Sejauh pengamatan penulis masih belum ada yang membahasnya. Namun untuk menghindari kesalahan dan untuk memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian

pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada, kajian pustaka penulis yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Nabilah Dzihnatur Mahasiswa Universitas Negeri Semarang, Fakultas Ilmu Sosial dengan Judul “Peran Organisasi Sayap Tidar (Tunas Indonesia Raya) Dalam Perluasan Basis Massa Partai Gerindra Di Jawa Tengah”. Skripsi ini meneliti tentang bagaimana organisasi sayap Tidar (Tunas Indonesia Raya) yang bernaung dalam Partai Gerindra dalam memperluas basis massa partai dan bagaimana kontribusi yang diwujudkan organisasi sayap Tidar merupakan bagian dari realisasi perannya dalam Perluasan basis massa Partai Gerindra, kontribusi tersebut diwujudkan dengan berbagai macam program kerja yang mampu menarik massa, program kerja tersebut kemudian dibagi kedalam dua segmen, yaitu Program Kerja Bidang dan Program Skala Nasional. Program Kerja Bidang, merupakan program kerja yang diselenggarakan per bidang dalam kepengurusan Tidar di daerah atau cabang tanpa campur tangan dari Pusat. Serta Program Skala Nasional merupakan program kerja yang dikoordinasi langsung dari pusat dan diselenggarakan di daerah atau cabang. Sedangkan Program Unggulan PD Tidar yaitu program besar PD Tidar yang

merupakan gabungan dari program kerja bidang dan program kerja nasional yang diunggulkan.³⁹

Adapun perbedaan dari penelitian di atas dengan penelitian penulis terdapat pada objek penelitian yang mana penulis melakukan penelitian terhadap IMDI (Insan Muda Demokrat Indonesia). Penulis juga lebih fokus terhadap peran organisasi sayap tersebut.

2. Skripsi yang ditulis oleh Ridho Ferdian Mahasiswa Universitas Lampung, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan Judul “Model Kaderisasi Partai Politik Melalui Sayap Partai Di Bidang Kepemudaan (Studi Perbandingan Sayap Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera)”. Skripsi ini meneliti tentang bagaimana model kaderisasi yang dilakukan oleh partai Gerindra, NasDem, PKS melalui Sayap Partai di bidang kepemudaan. Kemudian, bagaimana kelebihan dan kelemahan kaderisasi melalui sayap partai politik. Hasil dari penelitian ini adalah Partai Gerindra dan NasDem telah melakukan pola kaderisasi terbuka, tidak tertutup/diskriminatif serta berjenjang, kedua partai tersebut dalam merekrut kader tidak ada batasan tertentu semua memiliki kesempatan yang sama untuk mendapat pelatihan menjadi kader yang mumpuni. PKS menganut sistem tertutup dan

³⁹ Skripsi Nabilah Dzihnaton yang berjudul Peran Organisasi Sayap Tidar (Tunas Indonesia Raya) Dalam Perluasan Basis Massa Partai Gerindra Di Jawa Tengah, 2015.

menggunakan prinsip berjenjang, partai ini merekrut calon-calon anggota yang memiliki nilai religius serta menjunjung tinggi nilai-nilai Islami. Kelebihan pada model kaderisasi sayap partai adalah dari segi sumber daya manusia dan kultur partai politik. Pemberdayaan organisasi sayap partai politik dibutuhkan karena dari situlah seorang kader dilatih bagaimana membangun sistem politik yang baik. Dari segi kultur partai politik, ketiga partai tersebut memiliki kultur yang dinamis dan memiliki citra yang baik di mata masyarakat. Sedangkan yang menjadi kelemahannya adalah, dari segi keuangan partai, partai hanya bergantung pada dana kas anggota dan bantuan pemerintah, sehingga terbatas untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu.⁴⁰

Adapun perbedaan dari penelitian di atas dengan penelitian penulis terdapat pada objek penelitian yang mana penulis melakukan penelitian terhadap IMDI (Insan Muda Demokrat Indonesia). Penulis juga lebih fokus terhadap peran organisasi sayap tersebut.

3. Skripsi yang ditulis oleh Amalia Hidayatul Fajrina Mahasiswa Universitas Airlangga, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan Judul “Strategi Rekrutmen Partai Gerindra dalam Kaderisasi Pemuda di Kota Surabaya”. Skripsi ini meneliti tentang strategi

⁴⁰ Skripsi Ridho Ferdian yang berjudul Model Kaderisasi Partai Politik Melalui Sayap Partai Di Bidang Kepemudaan (Studi Perbandingan Sayap Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera). 2019.

rekrutmen oleh Partai Gerindra dalam melakukan kaderisasi pemuda di kota Surabaya. Studi ini menggunakan Teori Rekrutmen Politik Michael Rush dan Phillip Althoff. Data diperoleh melalui indepth interview dengan beberapa narasumber yaitu pengurus aktif DPC Partai Gerindra Surabaya, serta para kader muda Partai Gerindra Surabaya. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Partai Gerindra di kota Surabaya memiliki beberapa strategi dalam melakukan rekrutmen kader muda, diantaranya adalah sistem terbuka, namun terkadang juga ditemukan sistem patronase di dalamnya. Hasil penelitian juga menunjukkan model strategi rekrutmen sistem figur masih menjadi strategi yang populer. Diketahui bahwa semua strategi tersebut memberi kesempatan secara luas dan terbuka kepada seluruh muda-mudi Indonesia yang merasa memiliki minat dan kemampuan untuk bergabung bersama dalam Partai Gerindra di Kota Surabaya.⁴¹

Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan adalah pada tujuan penelitian dari penelitian sebelumnya tidak ada yang meneliti tentang bagaimana perekrutan kader partai politik melalui sayap partai.

⁴¹ Skripsi Aulia Hidayatul Fajrin yang berjudul Strategi Rekrutmen Partai Gerindra Dalam Kaderisasi Pemuda di Kota Surabaya. 2017.

3. Skripsi yang ditulis oleh Deby Triasa dengan judul Sistem Kaderisasi Partai Golkar Era Reformasi (Studi Kasus DPD Golkar Jawa Tengah). Skripsi ini meneliti tentang pola rekrutmen politik yang dijalankan oleh Partai Golkar dalam merekrut calon anggota Partai Golkar, mengetahui kaderisasi politik yang dilaksanakan oleh Partai Golkar untuk melahirkan kader-kader partai sesuai dengan paradigma baru Partai Golkar, dan mengetahui pelembagaan politik Partai Golkar dalam rangka memperkuat internal maupun eksternal partai. menggunakan metodologi penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pola rekrutmen politik Partai Golkar di era reformasi bersifat terbuka dan tidak menyiapkan tim seleksi dalam Pelembagaan politik Partai Golkar belum sempurna karena masih adanya ketergantungan partai terhadap pihak-pihak yang berasal dari non partai, khususnya masalah dana. rekrutmen calon anggota partai. Kaderisasi politik Partai Golkar sudah bagus, tetapi masih ada kendala masalah keuangan dan instruktur materi.⁴²

Perbedaan dari penelitian diatas dengan penelitian yang penulis lakukan adalah pada tujuan penelitian, yang mana pada penelitian sebelumnya tidak ada yang meneliti Peran Organisasi Sayap Partai politik dalam perekrutan kader dan faktor apa yang mempengaruhi

⁴² Skripsi Deby Triasa yang berjudul Sistem Kaderisasi Partai Golkar Era Reformasi (Studi Kasus DPD Golkar Jawa Tengah). 2012.

kualitas kader partai. Kemudian konteks objek yang diteliti juga berbeda, yang mana penulis lebih fokus kepada Organisasi Sayap Partai IMDI Partai Demokrat.

4. Skripsi yang ditulis oleh Galih Rahmat Septianto yang berjudul “Analisis Perilaku Organisasi Pimpinan Daerah Muhammadiyah Klaten (studi terhadap kegiatan bakti sosial air bersih oleh PDM Klaten)”. Penelitian ini mendiskusikan kegiatan sosial yang dilakukan PDM Klaten pada akhir tahun 2013. PDM mengirimkan bantuan air bersih untuk warga di lereng Merapi yang dilanda kekeringan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penilaian masyarakat terhadap PDM Klaten. Penelitian ini juga untuk melihat manajemen organisasi PDM Klaten. Hasil dari penelitian ini adalah bantuan yang diberikan oleh PDM Klaten kepada warga di lereng merapi tidak memberikan dampak sosial signifikan. Warga menilai bantuan yang diberikan oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Klaten hanya bersifat konsumtif. Temuan lain dari penelitian ini adalah manajemen organisasi di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Klaten tidak berjalan dengan baik, karena tidak adanya koordinasi antar Lembaga maupun Majelis.⁴³

⁴³ Galih Rahmat Septianto, Analisis Perilaku Organisasi Pimpinan Daerah Muhammadiyah Klaten (Studi terhadap kegiatan bakti sosial air bersih oleh PDM Klaten), Skripsi (Yogyakarta: Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, UIN Sunan Kalijaga, 2016), hlm. 103.

Adapun perbedaan dari penelitian diatas dengan penelitian yang penulis lakukan adalah pada tujuan penelitian, yang mana pada penelitian sebelumnya hanya meneliti bagaimana peran organisasi dan manajemen organisasi